



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 306/SP.HCP/LPPM/UNIJA/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Nama : Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul **“MODUL PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS: EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN”** dan mendapatkan hasil similarity sebesar 22%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 28 Oktober 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.

NIDN. 0714077402

MODUL PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS: EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

by Nur Inna Alfiyah

Submission date: 28-Oct-2022 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1937469736

File name: 0727039101-862-Artikel-Plagiasi-27-10-2022.docx (558.45K)

Word count: 4028

Character count: 28444

MODUL
PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK
STUDI KASUS: EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN



OLEH

Nur Inna Alfiyah, S.IP.,M.Hub.Int

Ida Syafriyani, S.Sos.,M.SI

PROGRAM STUDI ADMINSTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km. 05 Patean
Telp.(0328) 664272 / Fax.(0328) 673088

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan bahan ajar dengan judul “Pengantar Kebijakan Publik Studi Kasus: Efektivitas Pengembangan Kawasan Minapolitan” untuk dipergunakan sebagai pegangan para mahasiswa/mahasiswi dalam mata kuliah Kebijakan Publik. Tujuan penulisan ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengembangkan kawasan pesisir yaitu kebijakan minapolitan, serta terkait pelaksanaan program minapolitan .

Proses penulisan ini banyak sekali mengalami hambatan dan kendala, terutama dalam hal keterbatasan akses informasi dan sumber-sumber bacaan diakarenakan proses penulisan dilakukan pada masa pandemi covid-19. Penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, mulai dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami tim peneliti menerima segala kritik dan saran yang mambangun dari pembaca untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan bagi penelitian berikutnya. Semoga penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pemerintah, akademisi, mahasiswa/i serta masyarakat terkait pemahaman kebijakan publik tentang pengembangan kawasan minapolitan.

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I KEBIJAKAN PUBLIK	4
1.1. Pengertian Kebijakan Publik	4
1.2. Tujuan Kebijakan Publik	5
1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	5
BAB II EFEKTIVITAS KEBIJAKAN	8
2.1. Indikator Efektivitas	8
2.2. Unsur-Unsur Efektivitas	10
2.3. Kriteria-Kriteria Efektivitas	12
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN MINAPOLITAN	14
BAB IV EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN	18
4.1. Pemahaman Program	19
4.2. Tepat Sasaran	19
4.3. Tepat Waktu	21
4.4. Tercapainya Tujuan	23
4.5. Perubahan Nyata	23
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB 1

3 KEBIJAKAN PUBLIK

1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan sebuah kebijaksanaan yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang dalam dunia pemerintahan guna mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat serta untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa dan negara. Kebijakan publik dibuat berdasarkan kepentingan bersama bukan berdasarkan pada kepentingan pribadi bahkan hanya memberikan keuntungan bagi perorangan saja. Kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan dibuat untuk kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Berbicara kebijakan publik, ada dua karakteristik dari kebijakan publik diantaranya :

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

1.2. Tujuan Kebijakan Publik

Terdapat beberapa tujuan dari adanya kebijakan publik disuatu negara, diantaranya sebagai berikut :

1. Menjamin ketertiban dalam negara atau dalam daerah sesuai dengan di tingkat dimana kebijakan tersebut dibuat.
2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya.
3. Untuk menciptakan sebuah ketenteraman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat.
4. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan pada masyarakat.

1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Budi Winarno (2012: 32-34) Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-

tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di

tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.¹

¹ Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta: Chaps Publishing

BAB II

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK

5
Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Segala bentuk kebijakan publik dibuat berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. suatu kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang bersifat nasional maupun regional. Pelaksanaan kebijakan harus berdasarkan pada prinsip efektivitas agar semua tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. efektivitas kebijakan dapat diukur melalui sejauh mana suatu kebijakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan publik, dimana untuk mengukur sukses atau tidaknya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dibutuhkan kajian atau pembahasan terkait efektifitas dari kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang diutarakan oleh Gitosudarmo dalam Sutrisno (2013 : 145) mengatakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang dapat diraihny berarti menjadi semakin efektif.²

2.1. Indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno (2013: 125-126) dalam mengukur efektivitas terdapat 5 indikator yaitu:

² Sutrisno, Edy. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana.

a. Pemahaman Program

Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memerlukan pemahaman dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mulai dari masyarakat sasaran hingga pihak pemerintah terkait. Keberhasilan pelaksanaan program kebijakan pemerintah tergantung seberapa paham masyarakat terhadap program kebijakan yang sedang dilaksanakan.

b. Tepat Sasaran

Kebijakan dibuat untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dimasyarakat. Tepat sasaran artinya program kebijakan pemerintah ditujukan kepada masyarakat sasaran yang memang benar-benar membutuhkan dan yang menjadi objek untuk pelaksanaan program kebijakan agar tujuan dari dibuatnya kebijakan dapat tercapai dengan optimal.

c. Tepat Waktu

Pelaksanaan suatu program kebijakan pemerintah hendaknya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya agar pelaksanaannya lebih optimal dan efektif. Tepat waktu artinya program yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi dan tidak terlambat dalam proses implementasinya.

d. Tercapainya Tujuan

Membuat sebuah program kebijakan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai setelah proses pelaksanaan program kebijakan. Suatu tujuan yang telah tercapai menandakan bahwa suatu program kebijakan telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan rencana sebelumnya. Ketika suatu

tujuan tercapai dengan baik dan optimal maka suatu program kebijakan dapat dikatakan efektif.

e. Perubahan Nyata³

Dengan adanya program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka tujuan akhir yang diinginkan adalah memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. artinya setiap program kebijakan yang dibuat dapat memberikan perubahannya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan suatu negara.

2.2. Unsur-Unsur Efektivitas

Upaya untuk mengukur efektivitas sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan kriteria lainnya yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dunia bisnis. Dari segi kriteria efektifitas, unsur-unsurnya antara lain (Makmur, 2015:7-8) :

- a. Ketepatan waktu, waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Ketepatan perhitungan biaya, dalam unsur ini ditekankan pada ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan.
- c. Ketepatan dalam pengukuran, setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan

³ Sutrisno, Edy. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana.

dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan adalah merupakan bagian dari keefektivitasan.

- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan, dalam menentukan pemilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik.
- e. Ketepatan berpikir, dalam unsur ini ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan, organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sehingga tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
- h. Ketepatan-ketepatan sasaran. Sasuai dengan apa yang dijelaskan dalam pembahasan penentuan tujuan, ⁷ sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. ⁴

⁴ Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

2.3. Kriteria-Kriteria Efektivitas

² Sutrisno (2010 : 149) juga mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercapai efektivitas organisasi baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

a. Produksi (*production*)

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

b. Efisiensi (*efficiency*)

Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan. Agar organisasi bisa bertahan perlu memperhatikan efisiensi. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi dan sebagainya.

c. Kepuasan (*satisfaction*)

Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka dapat merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya.

d. Adaptasi (*adaptiveness*)

Kemampuan adaptasi ialah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan, kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak di banding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun demikian, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam.

e. Perkembangan (*development*)

Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Usaha pengembangan kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya dengan baik untuk sekarang maupun yang akan datang.⁵

⁵ Sutrisno, Edy. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN MINAPOLITAN

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar melihat Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, banyak potensi alam laut yang dapat dimanfaatkan sehingga ⁴ saat ini potensi tersebut perlu ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. ⁴ Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik berskala internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan minapolitan merupakan salah satu kebijakan yang dibuat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sehingga perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dengan konsepsi Minapolitan. Konsep Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep ¹⁰ pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk ¹⁰ kelautan dan perikanan.

Sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2010 tentang Minapolitan, Minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama

ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya.

Minapolitan merupakan konsep pengembangan ekonomi berbasis kawasan berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir dimana diperlukan sinergi lintas sektor baik dari K/L, swasta maupun masyarakat. Sesuai Permen KP No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, diperlukan beberapa persyaratan dalam penetapan kawasan Minapolitan diantaranya, komoditas unggulan, *masterplan*, fasilitas pendukung, letak geografis, komitmen Pemerintah Daerah dan lain-lain. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk serta pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Tujuan akhir dari pengembangan kawasan Minapolitan tentunya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dengan parameter peningkatan pendapatan.⁶

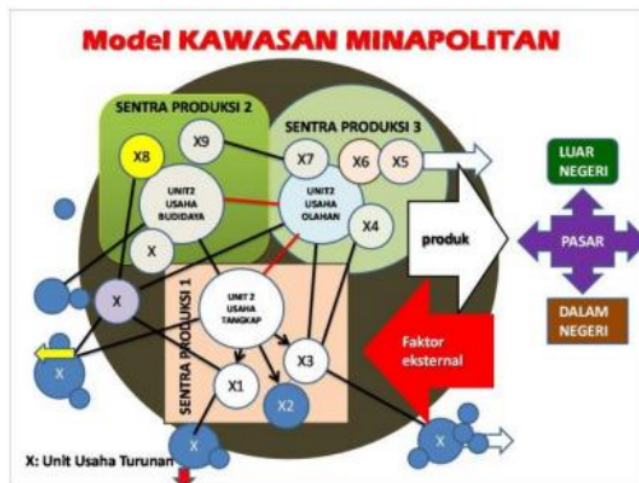
Program minapolitan sendiri memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaannya, tujuan tersebut yang tercantum dalam ¹² Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 Pasal 3 Tentang Minapolitan menyebutkan diantaranya :

- ⁶ a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

⁶http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143574-%5B_Konten_%5D-Konten%20D119.pdf

Penentuan kawasan minapolitan harus memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya agar program minapolitan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Karakteristik kawasan minapolitan meliputi : pertama, suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan; kedua, mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi; ketiga, menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan keempat, mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.⁷

Berikut ini model kawasan minapolitan :



Konseptual Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan

⁷ [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-\[_Konten_\]_Konten%20D138.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-[_Konten_]_Konten%20D138.pdf)

8 dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Sementara itu, Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Konsep Minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas (*limited state intervention*), serta penguatan daerah dengan prinsip: daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdayanya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.⁸

Program Nasional Minapolitan mengangkat konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan struktur:

1. **Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah:** Indonesia dibagi menjadi sub – sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sda, prasarana dan geografi
2. **Kawasan ekonomi unggulan- minapolitan :** setiap propinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan
3. **Sentra produksi:** setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan kegiatan lainnya yang saling terkait
4. **Unit produksi/usaha:** setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku-pelaku usaha.usaha perikanan produktif.⁹

⁸ [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-\[_Konten_\]_Konten%20D138.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-[_Konten_]_Konten%20D138.pdf)

⁹ [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-\[_Konten_\]_Konten%20D138.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-[_Konten_]_Konten%20D138.pdf)

BAB IV

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai wadah dalam menangani kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan tentu ini menjadi salah satu tugas penting bagi kementerian untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Dimana melalui misinya KKP telah menetapkan beberapa strategi yang menjadi acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum, antara lain; *pertama*, memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi. *Kedua*, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. *Ketiga*, Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan. *Keempat*, memperluas akses pasar domestik dan internasional¹⁰. Berdasar pada misi dari KKP, tentu dalam upaya mewujudkan misi tersebut membutuhkan program yang mampu merepresentasikan tujuan-tujuan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi daerah pesisir. Salah satu langkah yang diambil oleh KKP adalah dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Minapolitan sendiri merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (<http://perpustakaan.bappenas.go.id>).

Sebuah program kebijakan minapolitan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya memiliki nilai efektivitas dalam pelaksanaannya. Untuk menilai tingkat efektivitas sebuah program dapat dilihat dari 5 indikator :

¹⁰ Bank Indonesia, 2015, "Books Pengembangan Sub Sektor Perikanan Budidaya Air Tawar di Kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau", Jakarta: Bank Indonesia

4.1. Pemahaman program

Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan (Sekjen KKP, 2013:10). Kemudian menurut Sekjen KKP (2013:16) Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan (c) meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Pengembangan kawasan minapolitan dikatakan efektif apabila para pelaku kebijakan, minimal dapat memahami akan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator efektivitas indikator yaitu terkait dengan pemahaman program menurut Sutrisno (2013: 125-126) bahwa suatu program atau kebijakan akan berjalan efektif jika para pelaku program atau kebijakan tersebut dapat memahami program yang akan dijalankan.

4.2 Tepat sasaran

Ketepatan sasaran merupakan unsur penentu berhasil tidaknya suatu program atau kebijakan yang dijalankan, tak terkecuali program pengembangan kawasan minapolitan. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berjalan selaras dan menghasilkan output yang diinginkan. Menurut Makmur (2015:7-8)¹¹. penentuan sasaran yang tepat dan baik yang

¹¹ Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Sasaran utama dalam program pengembangan kawasan minapolitan adalah para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sesuai dengan bidangnya seperti dinas perikanan dan kelautan. Selain itu sasaran utama dalam pengembangan kawasan minapolitan adalah masyarakat-masyarakat pesisir yang memiliki potensi untuk menjadi kawasan dalam pengembangan program minapolitan. Kawasan yang terpilih adalah kawasan yang nantinya dapat mengembangkan program yang telah dirancang oleh pemerintah sehingga dapat menjadi kawasan yang dapat memberikan contoh sebagai kawasan yang mampu berkembang dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Sasaran utama dalam program pengembangan kawasan minapolitan lebih banyak berfokus dalam masalah hasil produksi, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi perikanan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pembahasan penentuan tujuan, ⁷ **sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.**

Program kebijakan ditujukan kepada pelaku kebijakan yang memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaannya. Tidak mungkin program kebijakan minapolitan dikembangkan pada kawasan yang jauh dari pesisir dan tidak memiliki potensi dalam perikanan. Sekalipun kawasan pesisir namun potensi perikanan yang tidak baik maka program kebijakan minapolitan tidak akan berjalan secara efektif dan optimal.

4.3 Tepat waktu

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan minapolitan adalah satu tahun dan selebihnya tergabung ke dalam kelompok budidaya ikan atau Pokdakan. Menurut Makmur (2015:7-8), waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya¹². Namun mulai dari tahun 2016, kewenangan di bidang kelautan yang diambil oleh pemerintah provinsi menjadi hambatan serius bagi Dinas Perikanan, karena mereka saat ini sudah tidak lagi memiliki kewenangan mereka di bidang kelautan. Hal ini membuat mereka hanya bisa sebatas membantu dalam hal monitoring, evaluasi dan pelaporan saja sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan inovasi-inovasi dikarenakan semuanya diambil alih dan sudah diatur oleh pihak pemerintah provinsi.

Program minapolitan sendiri ditetapkan pada tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Minapolitan sendiri merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Dikatakan tepat waktu ketika program minapolitan dapat diimplementasikan tidak jauh setelah ditetapkannya kebijakan tersebut.

⁶ Kita ambil contoh implementasi kebijakan program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep tidak membuang-buang waktu untuk langsung menerapkan program minapolitan di

¹² Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

wilayahnya. Terbukti program minapolitan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep pernah menjadi wilayah percontohan dalam kawasan minapolitan selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Program Minapolitan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berlandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang minapolitan yang kemudian pada tahun 2011 telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) lokasi sentra produksi perikanan budidaya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.70/DJ-PB/2010 Tentang Penetapan 24 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Percontohan Tahun 2011 Kabupaten Sumenep termasuk ke dalam lokasi sentra perikanan budidaya di bidang klaster rumput laut. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan bidang perikanan dan kelautan dibuktikan dengan masuknya Kabupaten Sumenep menjadi wilayah percontohan dalam Kawasan Minapolitan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP. 123/DJ-PB/2011 tentang Penetapan 46 lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2012. Hal tersebut terus dipertahankan Kabupaten Sumenep dengan tetap menjadi wilayah percontohan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.240/DJ-PB/2012 tentang Penetapan 87 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2013. Bahkan pada tahun kelima pun Kabupaten Sumenep tetap menjadi wilayah percontohan sehingga menjadi wilayah prioritas dalam penerapan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya.

4.4 Tercapainya tujuan

Akmal dalam Priansa (2015 : 11) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil¹³. Penyelarasan antara tujuan dan output yang dihasilkan baik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang paling mendasar dalam mewujudkan keberhasilan program itu sendiri. Minapolitan sendiri merupakan upaya pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Pengembangan Kawasan minapolitan adalah langkah yang diambil pemerintah dalam menciptakan *blue economy* dengan tujuan dapat mengangkat perekonomian daerah Kawasan pesisir.

Meningkatnya produksi perikanan seperti rumput laut merupakan contoh dimana program pengembangan kawasan minapolitan dapat dikatakan efektif. Dengan adanya program minapolitan maka diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki. organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sehingga tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Tujuan yang diharapkan dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari hasil produksi dan nilai produksi budidaya rumput laut.

4.5 Perubahan nyata

Setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang berupa suatu kebijakan seperti pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat memberikan perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan daerah

¹³ Priansa, Donni Juni., Garnida, Agus. 2015. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.

atau kawasan sebagai tempat implementasi kebijakan. Perubahan tersebut tentunya adalah perubahan yang positif untuk pengembangan daerah .

Perubahan nyata harus dirasakan oleh masyarakat dan harus terwujud sebagai bentuk keberhasilan program tersebut. Perubahan dapat dilihat dari inovasi program dan manfaat terhadap masyarakat. Dalam implementasinya program minapolitan memiliki banyak sub program yang dijalankan seperti program pengadaan bibit unggul, pengembangan demfarm metode longline dan metode rakit. Namun selain itu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat maka program yang dilakukan langsung pada sasaran utama yaitu masyarakat dengan mensosialisasikan cara pengolahan rumput laut, membentuk Pokmas-pokmas untuk mengawasi secara langsung jalannya perekonomian dan pada saat itu juga kami mengadakan program pengembangan wirausahawan muda dalam usaha penumbuhan pembibitan rumput laut.

Program minapolitan sendiri telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Saronggi. Banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan berupa bibit unggul sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih meningkat karena faktor bibit unggul yang dapat meningkatkan produksi sekaligus pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta: Chaps Publishing
- Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, Edy. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Priansa, Donni Juni., Garnida, Agus. 2015. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-\[_Konten_\]-Konten%20D138.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143766-[_Konten_]-Konten%20D138.pdf)

MODUL PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS: EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.dictio.id Internet Source	8%
2	eprints.uny.ac.id Internet Source	7%
3	jeckprodeswijaya.blogspot.com Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	repository.penerbitwidina.com Internet Source	1%
6	adoc.pub Internet Source	1%
7	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	1%
8	Armen Zulham, Subhechanis Saptanto. "KESIAPAN PROGRAM DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP LAUT PADA KAWASAN MINAPOLITAN", Jurnal	1%

Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2012

Publication

9	cerdika.com Internet Source	<1 %
10	Lita Dharmayuni. "Opini Disclaimer: Di mana Auditor Internal? Studi Kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia", Eksos, 2021 Publication	<1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On